BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG DARI DANA PERIMBANGAN SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan besaran Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong dari Dana Perimbangan Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 8);
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 4) ;
13. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Balee Seumeubeut dan Dayah dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 44);
15. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 32);
16. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 34);
17. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 44);
18. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 43);
19. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG DARI DANA PERIMBANGAN SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan Gampong dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Jumlah Gampong adalah jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.

9. Pemerintah Gampong adalah Geutjhik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

10. Tuha Peut Gampong adalah Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong.

11. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Geutjhik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

13. Rekening Kas Gampong adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh Penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Gampong, arah kebijakan keuangan Gampong, kebijakan umum dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), lintas SKPK dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

15. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMG yang memuat rancangan kerangka ekonomi Gampong, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Gampong, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Gampong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten dan RPJMG.

16. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah lembaga pendidikan yang ada di tingkat Gampong.

17. Tenaga Keagamaan adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan keagamaan di masing-masing Gampong yang diangkat dengan Keputusan Geuthjik melalui proses musyawarah Gampong, yaitu pimpinan dan guru Balee Seumeubeut, pimpinan dan guru TPA, Imam dan Bilal

Mesjid, Imam Meunasah dan Bilal Meunasah, serta Pentajhiz Mayat.

18. Balee Seumeubeut adalah sebuah lembaga/sarana pendidikan yang dibangun oleh masyarakat dan digunakan untuk belajar ilmu agama yang sifatnya temporer.
19. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar Dinul Islam pada anak usia Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau bahkan yang lebih tinggi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN ADG

Pasal 2

ADG dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembinaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Pasal 3

Tujuan ADG adalah:

a. meningkatan kapasitas Pemerintahan Gampong dan kemampuan kelembagaan Gampong dalam membantu program pembangunan secara mandiri dengan memberdayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara optimal untuk kepentingan masyarakat;
b. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
c. meningkatkan kemandirian Gampong.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADG

Pasal 4

(1) Pengelolaan ADG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG.
(2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADG direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Gampong.
(3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

(4) ADG dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV
PELAKSANAAN ADG

Pasal 5

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan ADG harus berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
(2) Pengelolaan ADG berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel dan partisipatif.
(3) Pelaksanaan ADG harus mengacu pada RPJMG dan RKPG masing-masing Gampong.

BAB V
SASARAN ADG

Pasal 6

(1) ADG diberikan secara langsung kepada 172 (seratus tujuh puluh dua) Gampong di Kabupaten Aceh Jaya melalui transfer dari rekening Kas Umum Kabupaten ke rekening Kas Umum Gampong.

(2) Penggunaan ADG dibagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

(3) ADG diutamakan untuk memenuhi pembiayaan kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 7

(1) Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, yaitu:
   a. penghasilan tetap dan tunjangan, meliputi:
      - belanja pegawai (penghasilan tetap Geutjhik dan perangkat Gampong, tunjangan Geutjhik dan perangkat Gampong, serta tunjangan Tuha Peut Gampong);
   b. Operasional Perkantoran, meliputi:
      - belanja barang dan jasa (alat tulis kantor, dan lain-lain);
      - belanja modal (printer, dan lain-lain).

c. Operasional Tuha Peut;
d. Operasional Kepala Dusun.

(2) Belanja pegawai dibayarkan sesuai dengan jumlah perangkat Pemerintahan Gampong dan berpedoman pada standar biaya yang telah ditetapkan.

(3) Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB VI
PENETAPAN BESARAN ADG

Pasal 8

(1) Total ADG Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 43.689.421.200,- (Empat puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).

(2) Besaran dana tiap Gampong dihitung berdasarkan:
a. alokasi dasar yaitu besarnya untuk setiap Gampong adalah sama, yaitu sebesar 90 % (sembilan puluh per seratus) dari jumlah dana perimbangan untuk ADG.
b. alokasi formula yaitu besarnya 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah dana perimbangan untuk ADG, yang dihitung berdasarkan variable utama (jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Gampong).

(3) Rumus perhitungan jumlah dana yang diterima Gampong adalah sebagai berikut:

ADG = [(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)] x (ADGkab – ADkab)

Keterangan:

W = Dana Gampong setiap Gampong
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap Total penduduk Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya
Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap luas wilayah Gampong dalamKabupaten Aceh Jaya
Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap total IKG Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya
ADGkab = pagu ADG Kabupaten
ADkab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Gampong dikalikan jumlah Gampong dalam Kabupaten

(4) Besaran ADG untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
MEKANISME PENCAIRAN DANA ADG

Pasal 9

(1) Pencairan ADG disalurkan melalui proses transfer dari rekening Kas Umum Kabupaten ke rekening Kas Umum Gampong atas nama Geuthjik dan Bendahara Gampong pada Bank yang ditunjuk.

(2) Pencairan dilakukan secara bertahap:
   a. tahap I pada bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
   b. tahap II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
   c. tahap III pada bulan September sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); dan
   d. tahap IV pada bulan November sebesar 25% (dua puluh per seratus).

Pasal 10

(1) Penyaluran ADG tahap I dilakukan setelah Geutjhik menyampaikan:
   a. Qanun Gampong mengenai APBG kepada Bupati;
   b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG tahun anggaran sebelumnya; dan
   c. Geutjhik menyampaikan Qanun Gampong dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.

(2) Penyaluran ADG tahap II dilakukan setelah Geutjhik menyampaikan:
   a. laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan pertama kepada Bupati; dan
   b. Geutjhik menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juni.

(3) Penyaluran ADG tahap III dilakukan setelah Geutjhik menyampaikan:
   a. laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan kedua kepada Bupati; dan

b. Geutjhik menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.

(4) Penyaluran ADG tahap IV dilakukan pada bulan November.

(5) Bupati menunda penyaluran ADG dalam hal Geutjhik tidak menyampaikan APBG dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan sebelumnya.

(6) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBG dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBG tahun anggaran sebelumnya.

(7) Rincian ADG yang diterima Gampong setiap tahun dianggarkan dalam APBG.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan tim pembinaan Pemerintah Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 12

Masyarakat Gampong dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan ADG dan melaporkan hasilnya kepada institusi yang telah ada yaitu Tuha Peut Gampong atau kepada Camat untuk menindaklanjutinya.

Pasal 13

Tuha Peut Gampong melakukan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan ADG dalam hal memberi saran dan masukan kepada Geuthjik terhadap pelaksanaan kegiatan agar mengacu kepada kegiatan yang sudah ditetapkan.

Pasal 14

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penggunaan ADG, akan dikenakan sanksi dan tindakan sesuai dengan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

(1) Pelaporan dan pertanggungjawaban ADG terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBG.

(2) Geuthjik bertanggung jawab atas pengelolaan ADG kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 03 Januari 2017 M
04 Rabi'ul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 03 Januari 2017 M
04 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 03 JANUARI 2017 M
04 RABI'UL AKHIR 1438 H

BESARAN ADG DARI DANA PERIMBANGAN UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2017

No.	KODE REKENING	NAMA GAMPONG	PAGU DANA GAMPONG PER-GAMPONG (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
I		**KECAMATAN JAYA**	
1	5. 1. 7. 09. 01	PASAR LAMNO	236.258.107
2	5. 1. 7. 09. 02	PANTE KEUTAPANG	247.540.298
3	5. 1. 7. 09. 03	GLE PUTOH (KEC. JAYA)	249.437.574
4	5. 1. 7. 09. 04	MEUNASAH WEH	261.753.061
5	5. 1. 7. 09. 05	BAK PAOH	265.073.456
6	5. 1. 7. 09. 06	BABAH KRUENG	257.047.474
7	5. 1. 7. 09. 07	LAM DURIAN	266.673.602
8	5. 1. 7. 09. 08	PUTUE	246.132.997
9	5. 1. 7. 09. 09	COT DULANG	258.420.917
10	5. 1. 7. 09. 10	LAM ME	256.021.114
11	5. 1. 7. 09. 11	MEUNASAH SERBA	242.879.166
12	5. 1. 7. 09. 12	LEUPEE	247.051.733
13	5. 1. 7. 09. 13	MEUTARA	250.657.010
14	5. 1. 7. 09. 14	LHUET	274.723.944
15	5. 1. 7. 09. 15	NUSA	247.046.629
16	5. 1. 7. 09. 16	RUMPET	242.433.805
17	5. 1. 7. 09. 17	GLE JONG	238.350.983
18	5. 1. 7. 09. 18	DARAT	241.387.506
19	5. 1. 7. 09. 19	BARO (KEC. JAYA)	248.235.847
20	5. 1. 7. 09. 20	PANTON MAKMUR (KEC. JAYA)	247.731.788
21	5. 1. 7. 09. 21	UJONG SEUDHEUN	244.171.757
22	5. 1. 7. 09. 22	KRUENG TUNONG	246.493.644
23	5. 1. 7. 09. 23	MEUDHEUN	266.280.283
24	5. 1. 7. 09. 24	BABAH IE	247.785.095
25	5. 1. 7. 09. 25	SAPEK	264.004.830
26	5. 1. 7. 09. 26	LAMBAROH	243.910.105
27	5. 1. 7. 09. 27	JAMBO MASI	254.334.953
28	5. 1. 7. 09. 28	LAMTUI	254.627.738
29	5. 1. 7. 09. 29	LAM ASAN	257.813.323
30	5. 1. 7. 09. 30	SANGO	254.128.073
31	5. 1. 7. 09. 31	SABET	269.003.842
32	5. 1. 7. 09. 32	PANTE CERMIN	264.956.057
33	5. 1. 7. 09. 33	MAREU	252.526.451
34	5. 1. 7. 09. 34	ALUE RAYEUK	247.214.668
II		**KECAMATAN INDRA JAYA**	
1	5. 1. 7. 09. 35	BABAH DUA (KEC. INDRA JAYA)	255.493.441
2	5. 1. 7. 09. 36	ALUE MIE	246.910.218
3	5. 1. 7. 09. 37	TEUMAREUM	272.067.674
4	5. 1. 7. 09. 38	JANGEUT	239.976.764

No.	KODE REKENING	NAMA GAMPONG	PAGU DANA GAMPONG PER-GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
5	5. 1. 7. 09. 39	UJONG MULOH	248.535.441
6	5. 1. 7. 09. 40	KUALA	261.250.289
7	5. 1. 7. 09. 41	MEUNASAH RAYEUK	241.952.533
8	5. 1. 7. 09. 42	MEUNASAH TEUNGOH	241.905.711
9	5. 1. 7. 09. 43	MEUNASAH TUTONG	242.752.078
10	5. 1. 7. 09. 44	MUKHAN	247.323.989
11	5. 1. 7. 09. 45	KEUDE UNGA	247.870.450
12	5. 1. 7. 09. 46	KAREUNG ATEUH	245.297.036
13	5. 1. 7. 09. 47	MEUDANG GHON	244.299.405
14	5. 1. 7. 09. 48	CEUNAMPRONG	261.629.027
III		**KECAMATAN SAMPOINIET**	
1	5. 1. 7. 09. 49	KRUENG NO	248.696.942
2	5. 1. 7. 09. 50	CRAK MONG	251.469.257
3	5. 1. 7. 09. 51	MEUNASAH KULAM	250.662.529
4	5. 1. 7. 09. 52	BLANG MONLUNG	246.268.364
5	5. 1. 7. 09. 53	ALUE GROE	248.217.377
6	5. 1. 7. 09. 54	LHOK KRUET	243.594.072
7	5. 1. 7. 09. 55	PULO RAYA	242.430.527
8	5. 1. 7. 09. 56	KUALA LIGAN	246.296.940
9	5. 1. 7. 09. 57	BABAH NIPAH	241.399.995
10	5. 1. 7. 09. 58	MATA IE	247.066.592
11	5. 1. 7. 09. 59	JEUMPHEUK	246.107.806
12	5. 1. 7. 09. 60	COT LANGSAT	242.997.542
13	5. 1. 7. 09. 61	KUALA BAKONG	248.604.865
14	5. 1. 7. 09. 62	LIGAN	290.379.864
15	5. 1. 7. 09. 63	SEUMANTOK	282.765.534
16	5. 1. 7. 09. 64	IE JEUREUNGEH	252.244.828
17	5. 1. 7. 09. 65	RANTO SABON	258.843.869
18	5. 1. 7. 09. 66	COT PUNTI	256.198.852
19	5. 1. 7. 09. 67	KRUENG AYON	255.463.197
IV		**KECAMATAN DARUL HIKMAH**	
1	5. 1. 7. 09. 68	TEUPIN ASAN	244.956.985
2	5. 1. 7. 09. 69	MASEN	259.509.324
3	5. 1. 7. 09. 70	BABAH DUA (KEC. DARUL HIKMAH)	255.784.286
4	5. 1. 7. 09. 71	BARO LAMTEUNGOH	260.269.075
5	5. 1. 7. 09. 72	LAM TEUNGOH	255.849.904
6	5. 1. 7. 09. 73	PANTON KRUENG (KEC. DARUL HIKMAH)	244.406.483
7	5. 1. 7. 09. 74	UJONG RIMBA	266.042.588
8	5. 1. 7. 09. 75	GUNONG CUT	268.080.835
9	5. 1. 7. 09. 76	SAYEUNG	246.898.000
10	5. 1. 7. 09. 77	ALUE GAJAH	247.455.802
11	5. 1. 7. 09. 78	KRUENG THO	269.053.556
12	5. 1. 7. 09. 79	PAYA SANTEUT	251.278.405
13	5. 1. 7. 09. 80	ARONGAN	254.344.683
14	5. 1. 7. 09. 81	COT PANGE	257.444.890
15	5. 1. 7. 09. 82	REUNTANG	261.943.783
16	5. 1. 7. 09. 83	PAJAR	265.519.005
17	5. 1. 7. 09. 84	BLANG DALAM	241.319.325
18	5. 1. 7. 09. 85	BARO PATEK	242.902.043
19	5. 1. 7. 09. 86	PATEK	243.123.545

No.	KODE REKENING	NAMA GAMPONG	PAGU DANA GAMPONG PER-GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
V		**KECAMATAN SETIA BAKTI**	
1	5. 1. 7. 09. 87	SAWANG	252.736.121
2	5. 1. 7. 09. 88	PADANG	253.021.778
3	5. 1. 7. 09. 89	LHOK GEULUMPANG	258.731.328
4	5. 1. 7. 09. 90	GUNONG MEUNASAH	252.690.485
5	5. 1. 7. 09. 91	SAPEK	266.447.389
6	5. 1. 7. 09. 92	PANTE KUYUN	275.896.950
7	5. 1. 7. 09. 93	GLE SEUBAK	246.462.960
8	5. 1. 7. 09. 94	BAROH	263.033.963
9	5. 1. 7. 09. 95	PAYA LAOT	252.084.092
10	5. 1. 7. 09. 96	LHOK TIMON	263.170.019
11	5. 1. 7. 09. 97	BARO (KEC. SETIA BAKTI)	250.634.790
12	5. 1. 7. 09. 98	LHOK BUYA	251.248.968
13	5. 1. 7. 09. 99	LHOK BOT	260.729.738
VI		**KECAMATAN KRUENG SABEE**	
1	5. 1. 7. 09. 100	BAHAGIA	245.838.716
2	5. 1. 7. 09. 101	SENTOSA	249.286.485
3	5. 1. 7. 09. 102	DAYAH BARO	262.265.106
4	5. 1. 7. 09. 103	BLANG	252.330.163
5	5. 1. 7. 09. 104	KEUTAPANG	266.681.830
6	5. 1. 7. 09. 105	PANTON MAKMUR (KEC. KRUENG SABEE)	253.494.625
7	5. 1. 7. 09. 106	KEUDE KRUENG SABEE	246.127.000
8	5. 1. 7. 09. 107	KABONG	250.686.883
9	5. 1. 7. 09. 108	PADANG DATAR	252.228.521
10	5. 1. 7. 09. 109	DATAR LUAS	272.689.807
11	5. 1. 7. 09. 110	RANTO PANYANG	251.134.053
12	5. 1. 7. 09. 111	BUNTHA	255.880.473
13	5. 1. 7. 09. 112	PANGGONG	264.385.253
14	5. 1. 7. 09. 113	CUREK	256.485.004
15	5. 1. 7. 09. 114	ALUE THO	256.478.821
16	5. 1. 7. 09. 115	MON MATA	258.059.446
17	5. 1. 7. 09. 116	PAYA SEUMANTOK	276.187.574
VII		**KECAMATAN PANGA**	
1	5. 1. 7. 09. 117	KEUDE PANGA	250.604.227
2	5. 1. 7. 09. 118	TUWI KAREUNG (KEC. PANGA)	279.900.636
3	5. 1. 7. 09. 119	KUTA TUHA	265.569.726
4	5. 1. 7. 09. 120	LADANG BARO	267.285.977
5	5. 1. 7. 09. 121	BATEE MEUTUDONG	243.262.270
6	5. 1. 7. 09. 122	ALUE PANDE	258.347.860
7	5. 1. 7. 09. 123	PANTON KRUENG (KEC. PANGA)	248.388.169
8	5. 1. 7. 09. 124	GLE PUTOH (KEC. PANGA)	256.920.644
9	5. 1. 7. 09. 125	ALUE PIET	259.055.785
10	5. 1. 7. 09. 126	HARAPAN	257.265.079
11	5. 1. 7. 09. 127	BABAH CEUPAN	247.084.681
12	5. 1. 7. 09. 128	ALUE RAYA	251.283.362
13	5. 1. 7. 09. 129	ALUE TEUNGOH	250.393.947
14	5. 1. 7. 09. 130	TUWI EUMPEUK	257.611.634
15	5. 1. 7. 09. 131	ALUE ABET	243.338.584
16	5. 1. 7. 09. 132	GUNONG MANTOK	244.031.864
17	5. 1. 7. 09. 133	GUNONG BULOH	256.137.114

No.	KODE REKENING	NAMA GAMPONG	PAGU DANA GAMPONG PER-GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
18	5. 1. 7. 09. 134	GUNONG MEULINTEUNG	244.919.338
19	5. 1. 7. 09. 135	TUWI KAYEE	240.716.537
20	5. 1. 7. 09. 136	PANTON KABU	241.266.824
VIII		**KECAMATAN TEUNOM**	
1	5. 1. 7. 09. 137	KEUDE TEUNOM	244.252.683
2	5. 1. 7. 09. 138	ALUE AMBANG	264.640.851
3	5. 1. 7. 09. 139	PADANG KLENG	280.422.798
4	5. 1. 7. 09. 140	PANTON	251.285.607
5	5. 1. 7. 09. 141	PASIE TULAK BALA	242.153.137
6	5. 1. 7. 09. 142	BARO (KEC. TEUNOM)	242.524.660
7	5. 1. 7. 09. 143	RAMBONG PAYONG	248.307.836
8	5. 1. 7. 09. 144	PASIE PAWANG	245.895.751
9	5. 1. 7. 09. 145	BLANG BARO	246.839.830
10	5. 1. 7. 09. 146	TANOH ANOU	269.194.371
11	5. 1. 7. 09. 147	TANOH MANYANG	268.550.095
12	5. 1. 7. 09. 148	BATEI ROO	246.249.982
13	5. 1. 7. 09. 149	SEUNEUBOK PADANG	250.343.086
14	5. 1. 7. 09. 150	SEUMIRA	248.828.666
15	5. 1. 7. 09. 151	KUBU	248.310.630
16	5. 1. 7. 09. 152	ALUE MEURAKSA	256.987.710
17	5. 1. 7. 09. 153	PAYA BARO	253.060.277
18	5. 1. 7. 09. 154	COT TRAP	253.337.031
19	5. 1. 7. 09. 155	LUENG GAYO	259.687.354
20	5. 1. 7. 09. 156	PASIE GEULIMA	257.103.733
21	5. 1. 7. 09. 157	TEUPIN ARA	251.830.348
22	5. 1. 7. 09. 158	PASIE TIMON	262.230.894
IX		**KECAMATAN PASIE RAYA**	
1	5. 1. 7. 09. 159	PASIE TEUBE	270.272.553
2	5. 1. 7. 09. 160	TIMPLEUNG	250.987.399
3	5. 1. 7. 09. 161	KRUENG BEUKAH	253.309.527
4	5. 1. 7. 09. 162	TUWI KAREUNG (KEC. PASIE RAYA)	292.279.885
5	5. 1. 7. 09. 163	LHOK GUCI	258.917.601
6	5. 1. 7. 09. 164	BINTAH	263.500.220
7	5. 1. 7. 09. 165	ALUE KRUENG	249.233.797
8	5. 1. 7. 09. 166	PULO TINGGI	245.261.506
9	5. 1. 7. 09. 167	SARAH RAYA	248.319.877
10	5. 1. 7. 09. 168	ALUE JANG	249.605.371
11	5. 1. 7. 09. 169	CEURACEEU	246.565.525
12	5. 1. 7. 09. 170	ALUE PUNTI	247.435.200
13	5. 1. 7. 09. 171	TUWI PEURIYA	272.005.384
14	5. 1. 7. 09. 172	BUKET KEUMUNENG	243.914.071
JUMLAH			**43.689.421.200**

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN